

**ANALISIS YURIDIS PENYITAAN ASET TINDAK  
PIDANA KORUPSI OLEH KPK DALAM RANGKA  
PENYELAMATAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Kerenhapukh Samosir**

**2240050045**



**PROGRAM STUDI HUKUM**

**PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**JAKARTA**

**2026**

**ANALISIS YURIDIS PENYITAAN ASET TINDAK  
PIDANA KORUPSI OLEH KPK DALAM RANGKA  
PENYELAMATAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia**

**Oleh**

**Kerenhapukh Samosir**

**2240050045**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2026**

**VISI DAN MISI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**Visi :**

Menjadi Fakultas Hukum yang Bermutu, Mandiri, dan Inovatif di Kawasan Asia pada Tahun 2030 dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

**Misi :**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

**NILAI-NILAI UKI**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

1. Rendah Hati (Humility) | Filipi 2:3b
2. Berbagi Dan Peduli (Sharing And Caring) | Ibrani 10:24
3. Professional (Professional) | Matius 25:21
4. Disiplin (Discipline) | Efesus 5:16
5. Bertanggung Jawab (Responsibility) | Matius 25:23
6. Berintegritas (Integrity) | Amsal 19:1



### PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Kerenhapukh Samosir  
**NIM** : 2240050045  
**Program Studi** : Hukum  
**Fakultas** : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulus tugas akhir yang berjudul “**Analisis Yuridis Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK Dalam Rangka Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara**” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam refrensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara refrensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam refrensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan dari kumpulan buku atau jurnal tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 3 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Kerenhapukh Samosir

NIM: 2240050045



**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

**“Analisis Yuridis Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK Dalam  
Rangka Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara”**

Oleh:

Nama : Kerenhapukh Samosir  
NIM : 2240050045  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna menacapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 3 Februari 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

(Asst. Prof. Dr. Armunanto Hutanaean, S.E., S.H., M.H.)  
(NUTPK: 6443754655130123)

Pembimbing II

(Asst. Prof. Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.)  
(NUPTK : 8033759660130223)

Ketua Program Studi Hukum

(Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)  
(NUPTK: 5759741642230062)



(Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)  
(NUPTK: 757658137093)



### PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada Tanggal 3 Februari 2026 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Kerenhapukh Samosir  
NIM : 2240050045  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Perminatan : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "Analisis Yuridis Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK Dalam Rangka Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Asst. Prof. Dr. Arminanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.	Ketua	
2. Asst. Prof. Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.	Anggota	
3. Francois Geny Ritonga, S.H., M.H.	Anggota	



HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PENYITAAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI  
OLEH KPK DALAM RANGKA PENYELAMATAN KERUGIAN  
KEUANGAN NEGARA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

Nama : Kerenhapukh Samosir

NIM : 2240050045

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 3 Februari 2026 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1)  
Susunan tim penguji,

Pembimbing Utama,

(Asst. Prof. Dr. Amunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.)  
(NUPTK : 6443754655130123)

Pembimbing Mendamping,

(Asst. Prof. Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.)  
(NUPTK : 8033759660130223)

Anggota Tim Penguji

(Francois Geny Ritonga, S.H., M.H.)  
(NUPTK : 7149769670130563)



**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Kerenhapukh Samosir  
**NIM** : 2240050045  
**Fakultas** : Hukum  
**Program Studi** : Hukum  
**Jenis Tugas Akhir** : Skripsi  
**Judul** : “Analisis Yuridis Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi  
Oleh KPK Dalam Rangka Penyelamatan Kerugian  
Keuangan Negara”

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berkak menyimpan, mengalih media/format-kan, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal 3 Februari 2026



Kerenhapukh Samosir  
NIM: 2240050045

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan hikmat-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Adapun penulisan Hukum yang berjudul dengan “Analisis Yuridis Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK Dalam Rangka Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara”. Skripsi ini merupakan hasil kerja keras penulis sebagai bentuk pemenuhan tugas akademis guna memperoleh gelar kersaajanaan Strata-1 (S1) dibidang Hukum pada Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka, analisis perundang - undangan, dan juga data pendukung yaitu data penyitaan aset dari KPK.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, izinkanlah pada kesempatan ini penulis mengucapkan Terimakasih terutama kepada yang terhormat Bapak Armunanto Hutahaean, S.E., S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing I dan kepada Bapak Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II atas kesabaran dan pengertiannya terhadap segala kondisi penulis serta kerelaan hati telah berkenan memberikan bimbingan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tidak akan mungkin skripsi ini dapat selesai dan berhasil apabila berjalan sendiri. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak – pihak yang sudah membantu, menemani, bimbingan, memberikan masukan dan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis ingin berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., Selaku Wakil Rektor Akademik dan Inovasi Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayanti, S.H., M.Hum. Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing, membantu dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat.
7. Bapak Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah membimbing dan memberi masukan terkait penulisan serta materi selama masa penyusunan skripsi.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan pengajaran selama masa perkuliahan penulis berlangsung.
9. Staff yang bekerja di Tata Usaha Fakultas Hukum Kristen Indonesia, Mami, Bang Berli, Bang Rey, Bang Indra, Kak Merli, Kak Melsi, Kak Mutiara, ka Jesika atas bantuan informasi selama perkuliahan yang selama penulis ikuti.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Nikolas G.F Samosir, S.E dan Ibu Rodiyah yang selalu mendoakan serta mendukung kegiatan penulis selama masa perkuliahan di Universitas Kristen Indonesia.
11. Saudara kembar penulis, Kezia Samosir, S.T yang sudah mendukung penulis selama kegiatan perkuliahan.

12. Teman-teman penulis, Tiar Jesika, Delva Geornata, Sem Immanuel, Ali Muchsin, Hans felix, Gilbert Alberto yang sudah menemani penulis dimasa perkuliahan sampai dengan penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga besar UKM Peradilan Semu FH UKI, yang sudah menjadi wadah penulis untuk berkembang dalam bidang akademik maupun sosial.
14. Kepada semua teman-teman FH UKI Angkatan 2022, terima kasih untuk masa-masa indah yang telah dijalani Bersama, kenangan-kenangan yang pernah dilalui, menjadi kebanggaan penulis bisa dan saat Bersama kalian.

Jakarta, 22 Januari 2026

**Kerenhapukh Samosir**



## DAFTAR ISI

VISI DAN MISI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iiiv
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Kerangka Konsep.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Terhadap Teori Kepastian Hukum Dan Teori Penegakan Hukum .....	14
1. Teori Kepastian Hukum .....	14
2. Teori Penegakan Hukum.....	16

<b>B. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana .....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
<b>C. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana Korupsi .....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	27
2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	30
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	38
<b>D. Tinjauan Umum Terkait Penyitaan Aset .....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Penyitaan Aset .....	39
2. Dasar Hukum Penyitaan aset .....	40
3. Unsur-Unsur Penyitaan Aset.....	41
<b>E. Tinjauan Umum Terkait Kerugian Keuangan Negara .....</b>	<b>42</b>
1. Pengertian Keuangan Negara .....	42
2. Pengertian Kerugian Keuangan Negara.....	44
3. Unsur-Unsur Kerugian Keuangan Negara.....	45
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
<b>A. Dasar Hukum Penyitaan Aset.....</b>	<b>46</b>
1. Ketentuan Penyitaan Dalam KUHAP.....	46
2. Ketentuan Penyitaan Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>Jo.</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terkait Tindak Pidana Korupsi.....	51
3. Kewenangan Penyitaan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi .....	52
4. Prinsip <i>Asset Recovery</i> dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara .....	55
5. Perbedaan Penyitaan Oleh KPK Dengan Penyitaan Yang Dilakukan Oleh POLRI/Kejaksaan .....	57
<b>B. Prosedur Pelaksanaan Penyitaan Aset Korupsi Oleh KPK.....</b>	<b>62</b>
1. Tahap Identifikasi dan Pelacakan Aset ( <i>Asset Tracing</i> ).....	62
2. Persiapan Penyitaan .....	63
<b>C. Tahap Pelaksanaan Penyitaan Di Lapangan.....</b>	<b>68</b>
1. Penetapan Objek.....	68
2. Penggeledahan.....	70

3. Penyitaan Fisik dan Administratif .....	73
4. Pencatatan dan Pengamanan Barang Sitaan .....	75
5. Pelaporan Hasil Penyitaan Dalam Penyidikan .....	78
D. Upaya dan Solusi Untuk Mengoptimalkan Penyitaan Aset .....	81
1. Harmonisasi Peraturan Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi....	81
2. Penguatan Kewenangan KPK Dalam <i>Asset Tracing</i> .....	84
3. Penguatan Pengawasan Internal Agar Penyitaan Tidak Cacat Hukum .....	86
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
<b>ANALISIS KEMANFAATAN PENYITAAN ASET OLEH KPK DALAM         MEMULIHKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA .....</b>	<b>89</b>
A. Konsep Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum .....	89
1. Pengertian Teori Kemanfaatan .....	89
2. Parameter Kemanfaatan Dalam Kebijakan Penegakkan Hukum...	91
3. Relevansi Konsep Kemanfaatan Dalam Praktik Penyitaan Aset Korupsi.....	97
B. Analisis Kemanfaatan Penyitaan Aset Dalam Praktik.....	99
1. Data Capaian KPK Dalam Pemulihan Asset.....	99
2. Analisis Manfaat Ekonomi.....	103
C. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemanfaatan Penyitaan.....	107
1. Faktor Pendukung .....	107
2. Faktor Penghambat .....	111
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>119</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan pemidanaan antara Undang-Undang 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana .....	25
Tabel 3. 1 Perbandingan penyitaan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana. ....	49



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Grafik Data Kerugian Keuangan Negara dan Pengembalian Keuangan Negara Tahun 2020-2024 oleh POLRI .....	62
Gambar 4. 1 Nilai Aset yang Disita pada Tahun 2020-2025.....	100



## ABSTRAK

- A Nama : Kerenhapukh Samosir  
B NIM : 2240050045  
C Bagian : Hukum Pidana  
D Judul : Analisis Yuridis Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Oleh  
KPK Dalam Rangka Penyelamatan Kerugian Keuangan  
Negara  
E Halaman : i-xiv 120 Halaman + Daftar Pustaka  
F Kata Kunci : Penyitaan Aset, Tindak Pidana Korupsi, KPK, Kerugian  
Keuangan Negara  
G Ringkasan Isi :

Indonesia sebagai negara hukum menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berdampak langsung pada kerugian keuangan negara. Korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* sehingga memerlukan upaya penegakan hukum yang luar biasa, salah satunya melalui penyitaan aset hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyitaan aset tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara.

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana pelaksanaan aturan penyitaan aset Tindak Pidana Korupsi oleh KPK dalam upaya menyelamatkan kerugian keuangan negara; dan kedua, sejauh mana efektivitas Tindakan penyitaan aset oleh KPK dalam memulihkan kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif KPK telah memiliki kewenangan yang kuat dalam melakukan penyitaan aset tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya efektivitas penyitaan aset masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pelacakan aset, perbedaan penafsiran hukum, dan rendahnya tingkat pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, optimalisasi kerja sama antar lembaga, serta peningkatan mekanisme *asset recovery* guna mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara.

- H Daftar Acuan : 36 Buku + 22 Jurnal + 1 Internet + 8 Peraturan Perundang-  
undangan  
I Dosen Pembimbing I : Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.  
Dosen Pembimbing II : Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.

Jakarta, 17 Januari 2026  
Penulis

Kerenhapukh Samosir

## ABSTRACT

- A Name : Kerenhapukh Samosir  
B Student ID : 2240050045  
C Field of Study : Criminal Law  
D Title : *Juridical Analysis of Asset Seizure in Corruption by the Corruption eradication Commission (KPK) in Safeguarding State Financial Losses*  
E Pages : i-xiv120 Pages + Daftar Pustaka  
F Keywords : *Asset Seizure, Corruption Crime, Corruption Eradication Commission (KPK), State Financial Losses*  
G Abstract :  

*Indonesia, as a state governed by the rule of law, continues to faces serious challenges in combating corruption, which directly causes substantial state financial losses. Corruption is categorized as an extraordinary crime, thereby requiring extraordinary law enforcement measures. One of the most significant measures is the seizure of assets derived from corruption crimes by Corruption Eradication Commission (KPK). Asset seizure functions not only as an evidentiary tool in criminal proceedings but also as strategic mechanisms for safeguarding and recovering state financial losses.*

*This research examines two primary issues: first, the implementation of legal regulation concerning asset seizure in corruption cases conducted by the KPK; and second, the extent to which such asset seizure is effective in restoring state financial losses. The research adopts a normative juridical method, employing statutory and conceptual approaches. Data are obtained through a comprehensive literature review of primary and secondary legal materials.*

*The findings demonstrate that, from a normative standpoint, the KPK is vested with strong legal authority to carry out asset seizure in corruption cases. Nevertheless, in practice, the effectiveness of asset seizure remains constrained by several obstacles, including limitations in asset tracing, inconsistencies in legal interpretation, and the low rate of asset recovery. Therefore, strengthening the regulatory framework, enhancing inter-agency cooperation, and optimizing asset recovery mechanisms are essential to achieve legal certainty and improve the effectiveness of recovering state financial losses in Indonesia.*

- H References : 36 books + 22 Journal + 1 Internet + 8 Legislation  
I Supervisor I : Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.  
Supervisor II : Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.

Jakarta, 17 January 2026  
Writer

Kerenhapukh Samosir